

BAB I

PENDAHULUAN

BAB pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini, dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai alasan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai keterkaitan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional dan definisi konseptual juga akan dijelaskan dalam bab ini, pengambilan definisi operasional dan definisi konseptual di dasarkan pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, dalam bab ini akan di bahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya, baik kaya sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kedua sumber daya tersebut akan selalu bersatu dan memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan saling mempengaruhi dan saling menjaga. Alam menjaga manusia sebaliknya manusia juga menjaga alam, maka akan terjalin hubungan yang serasi antara alam dengan manusia. Kekayaan alam Indonesia memiliki dampak bagi perubahan iklim dan cuaca baik secara kecil maupun perubahan yang besar, perubahan besar pada iklim dan cuaca juga dapat menyebabkan bencana yang disebut hidrometeorologi, adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca. (Paryono, Ario, Budi, Rokhimin, & Henny, 2017)

Tercatat kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia diantaranya pada 2018 sudah ada 2,572 kejadian bencana, dengan catatan korban jiwa meninggal sebanyak 4,814 jiwa, korban luka-luka sebanyak 21,083 jiwa dan jumlah pengungsi mencapai 10,333,309 jiwa. Untuk kerusakan infrastrukturnya bangunan dengan kondisi rusak berat berjumlah 150,513 bangunan, rusak sedang 39,815 bangunan, rusak ringan 129,837 bangunan. Semua bangunan atau fasilitas fisik yang rusak terdiri dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik umum, apotek, dan rumah sakit sebanyak 106 bangunan, fasilitas peribadatan sebanyak 857 bangunan dan fasilitas pendidikan 1,736 bangunan. Adapun rincian kejadian bencana sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana BNPB Tahun 2018

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)		Kerusakan (Unit)	
			Meninggal	Luka-Luka	Rumah	Fas. Umum
1.	Puting Beliung	807	24	176	15,857	134
2.	Banjir	679	119	221	4,280	738
3.	Tanah Longsor	473	167	127	2,076	49
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	370	4	4	2	
5.	Kekeringan	129	-	-	-	-
6.	Letusan Gunung Api	58	-	56	-	-

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id/>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bencana angin puting beliung menempati posisi pertama, bencana banjir di posisi kedua, dan tanah longsor berada di posisi ketiga. Dari ketiga bencana tersebut, bencana tanah longsor adalah bencana yang

paling sulit untuk dilakukan mitigasi, karena bencana ini terjadi secara mendadak dan cepat. Mungkin bencana banjir dan tanah longsor disebabkan oleh hal yang sama yakni curah hujan dan kerusakan lingkungan seperti hutan gundul. Namun apabila kita bandingkan antara kedua bencana tersebut tanah longsor lebih cepat datang dan terjadi secara mendadak tanpa dapat dihindarkan.(BNPB 2018)

Tanah longsor adalah sebuah fenomena perpindahan batuan atau tanah berbentuk lereng atau gundukan yang bergerak kebawah atau keluar struktur yang ada, dan menyebabkan bentukan tanah atau bebatuan yang baru. Tanah longor dapat disebabkan oleh kondisi alam (dataran tinggi seperti bukit atau gundukan tanah) yang tidak dibarengi oleh manajemen perawatan dan penjagaan yang baik. Faktor alam dan faktor manusia selalu menjadi alasan terjadinya tanah longsor. Faktor alam adalah sebuah faktor yang secara alami sudah ada dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia, secara alam tanah longsor dapat terjadi dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan terjadi secara berturut-turut dengan keadaan dan bentuk lereng yang terjal juga curam tanpa adanya pepohonan dengan akar yang kuat untuk menahan pergerakan tanah ataupun bebatuan disekitar lereng tersebut. Faktor manusia adalah sebuah faktor yang disebabkan oleh manusia dan berdampak pada kelangsungan hidup pihak lain, faktor manusia juga sering disebut sebagai faktor menegemen, secara faktor manusia tanah longsor disebabkan oleh intensitas penggunaan serta perawatan lahan, kepadatan penduduk, dan pembanguna infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Sulistyo Andri, 2017)

Banjarnegara secara geografis berada pada pertengahan bukit-bukit yang membentang di daerah Jawa Tengah, dengan demikian Banjarnegara memiliki banyak

lereng dan gundukan tanah yang memiliki resiko tinggi akan bencana tanah longsor. Tanah yang subur dan gembur menjadikan Banjarnegara memiliki potensi hasil perkebunan dan hasil perhutanan yang cukup bagus, hal ini yang membuat para petani di Banjarnegara banyak mengalih fungsikan lahan yang tadinya ditanami pohon besar untuk menjaga tanah agar tidak longsor tetapi diganti menjadi lahan perkebunan. Apabila kita lihat dan kita cek kedataran tinggi bagian selatan Banjarnegara, tepatnya di daerah Banjarmangu, Wanayas, Karangkobor, Batur, sampai ke Dieng telah banyak alih fungsi lahan yang dilakukan oleh petani setempat. Lahan yang tadinya ditanami dengan pepohonan besar sekarang diganti menjadi lahan pertanian sayur dan buah-buahan seperti kentang, sawi, wortel, dan lain sebagainya. Kondisi demikian terjadi bukan tanpa sebab, ada beberapa faktor yang mengakibatkan alih fungsi tersebut terjadi diantaranya, lahan untuk pertanian dijadikan bangunan sehingga lahan pertanian menjadi sempit, yang kedua adalah lahan akan lebih menguntungkan bagi petani apabila lahan tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian. Dan yang paling utama adalah faktor kesadaran akan bahaya tanah longsor yang selalu mengintai warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara khususnya adalah daerah-daerah di pegunungan Kabupaten Banjarnegara.

Program mitigasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penaggulangan bencana dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancama bencana dengan tetap menjaga keaslian serta kearifan sosial dan budaya setempat. Program mitigasi tidak hanya memberikan perlindunag kepada masyarakat namun juga memberika jaminan terselenggaranya program mitigasi dengan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh serta tetap menjaga asas gotong royong,

kesetiakawanan, dan kedermawanan. Program mitigasi juga harus mampu menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir setiap daerah mencoba untuk membuat program mitigasi sesuai dengan UU yang berlaku namun juga masih dapat memberikan rasa aman serta dapat menjaga masyarakat dari ancaman bencana alam. Program mitigasi juga diselaraskan dengan potensi bencana yang akan terjadi disebuah daerah.(UU No. 24 Tahun 2007)

Melalui penelitian ini peneliti akan mencoba menjelakan bagaimana proses mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018. Serta berusaha untuk memberi masukan serta kritikan dalam menjalankan mitigasi bencana.

1.2. Rumuan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memaparkan pelaksanaan program mitigasi bencana secara umum dan program mitigasi lebih mendalam mengenai mitigasi bencana tanah longsor

2. Memaparkan evaluasi program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antaranya adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis, yang keduanya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Dengan diadakannya penelitian mengenai evaluasi program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara hal ini dapat dijadikan tinjauan pustaka dan referensi untuk penelitian yang akan datang. Yang kedua untuk menambah khasanah penelitian mengenai evaluasi program mitigasi bencana tanah longsor.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk:

1. Sebagai bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam melakukan program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara
2. Sebagai dasar pembuatan kebijakan selanjutnya bagi pihak-pihak terkait

1.5. Literature Review

No	Judul	Penulis	Isi
1.	Analisis Penentuan Zona Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara)	Dhuha Ginanjar Bayuaji, Arief Laila Nugraha, Abdi Sukmono Tahun 2016	Pada penelitian ini dijelaskan mengenai penentuan zona risiko bencana tanah longsor yang didasarkan pada peta risiko bencana. Dijelaskan juga mengenai pola pemetaan risiko bencana tanah longsor berbasis Sistem Informasi Geografis dibuat dengan <i>software</i> GIS dengan cara skoting dan pembobotan.
2.	Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara	Amni Zarkasyi Rahman	Banjarnegara adalah Kabupaten yang memiliki kawasan pegunungan dengan resiko tanah longsor cukup tinggi. Ada beberapa kecamatan di Banjarnegara yang memiliki resiko bencana tanah longsor cukup tinggi Kecamatan Wanayasa (64,41 ha), pagedongan (43,78 ha), Banjarnegara (38,84 ha) Bawang (18,65 ha), Kalibening (1,21 ha), Karangkoban (3,58 ha), Pandanarum (21,34 ha), Susukan (4,03), dan Mandiraja (0,30 ha). Dari data diatas kecamatan yang memiliki areal rentan longsor adalah kecamatan Wanayasa. Kecamatan ini rentan longsor karena memiliki area dengan kelas kemiringan lereng 65%-85% (agak tinggi).
3.	Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana	Dradjat Suhardjo	Program mitigasi wajib dilakukan melalui pendidikan formal dalam program Sistem Pendidikan Nasional (Diknas) dengan desain kurikulum dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk jalur pendidikan informal melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian

			<p>Perhubungan.</p> <p>Untuk program relokasi pasca bencana merupakan tanggung jawab Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi (Nakertrans) bekerja sama dengan pemerintah daerah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan transmigran</p>
4.	<p>Analisis Morfosmetri dan Morfostruktur Lereng Kejadian Longsor di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara</p>	<p>Kuswaji Dwi Priyono dan Priyono</p>	<p>Dari hasil pemetaan risiko bencana tanah longsor menggunakan metode SNI, terdapat tingkat risiko rendah sebesar 27,742% atau seluas 31887,378 Ha, tingkat risiko sedang sebesar 36,875% atau seluas 42385,93 Ha, dan untuk tingkat risiko tinggi sebesar 35,583 % atau seluas 40670,2196 Ha yang tersebar di 20 kecamatan yang meliputi 266 desa dan 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>Sedangkan hasil pemetaan risiko bencana tanah longsor menggunakan metode AHP, terdapat tingkat risiko rendah sebesar 17,291% atau seluas 19874,4366 Ha, tingkat risiko sedang sebesar 35,151% atau seluas 40403,8742 Ha, dan untuk tingkat risiko tinggi sebesar 47,558 % atau seluas 54665,2168 Ha yang tersebar di 20 kecamatan yang meliputi 266 desa dan 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara</p>
5.	<p>Analisis Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Dasar Mitigasi di Kabupaten Banjarnegara</p>	<p>Pranatasari Dyah Susanti , Arina Miardini , dan Beny Harjadi Tahun 2007</p>	<p>Banjarnegera merupakan salah satu kabupaten yang secara historis sering mengalami bencana tanah longsor. Data dan informasi kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara misalnya, dari Bulan Januari sampai September 2016, telah terjadi 12 kali kejadian bencana longsor dengan korban meninggal 7 orang, luka-luka 7 orang dan mengungsi 1.237 orang</p>

6.	Analisis Penyebab Tanah Longsor di Kalitlaga Banjarnegara	Arwan Apriyono	Longsor yang terjadi di Desa Kalitlaga adalah Type Nendatan (longsoran cekung). Longsor disebabkan oleh keadaan topografi, drainase dan kondisi geologi lokasi. Diperlukan tambahan investegasi dan monitoring untuk mendukung countermeasure.
----	---	----------------	--

Dari 6 penelitian yang telah di runut, peneliti menemuka hasl-hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dipenelitian pertama dijelaksan mengenai penentuan zona risiko bencana tanah longsor yang didasarkan pada peta risiko bencana. Dijelaskan juga mengenai pola pemetaan risiko bencana tanahy longsor berbasis Sistem Informasi Geografis dibuat dengan *software* GIS dengan cara skoting dan pembobotan.
2. Pada penelitian kedua peneliti menjelaskan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang berpotensi mengalami longsor lengkap dengan luas daerah.
3. Selanjutnya pada penelitian ketiga penulis menerangkan bahwa pendidikan mitigasi bencana sangat penting baik melalui pendidikan formal maupun informal.
4. Untuk penelitian keempat peneliti berhasil memetakan resiko bencana tanah longsor menjadi dua metode.
5. Penelitian kelima menerangkah bahwa secara historin Banjarnegara merumakan daerah yang sering mengalami bencana tanah longsor, hal ini disebabkan oleh keadaan lereng.

6. Penelitian keenam menjelaskan mengenai analisis kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di desa Kalitlaga Banjarnegara, mengenai faktor penyebabnya.

Berdasarkan referensi penelitian di atas, maka peneliti akan membedakan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dibedakan adalah, penelitian akan lebih menekankan pada pelaksanaan program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara secara ilmu pemerintahan baik secara proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Penelitian yang akan dilakukan ini juga lebih menekankan pada peran pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui BPBD Banjarnegara dalam mengurangi risiko bencana tanah longsor.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1. Evaluasi Program

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti adalah penilaian atau proses pemberian nilai terhadap sesuatu untuk mengetahui kelayakannya. Evaluasi program/kebijakan adalah proses memberikan penilaian terhadap sebuah kebijakan atau program yang telah berjalan selama periode tertentu, evaluasi program dilakukan oleh semua hierarki pemerintahan dari yang terkecil hingga pemerintah pusat. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>)

Pada saat ini telah terjadi perubahan jenis evaluasi, evaluasi bukan lagi hanya berpaku pada apa yang dikeluarkan (*output*) melainkan pada berfungsinya *output* itu sendiri, sehingga proses evaluasi tidak terbatas hanya pada kerja atau program yang dihasilkan melainkan pada keseluruhan manfaat dari program itu sendiri.

a. Tipe tipe evaluasi

Menurut Jody Zall Kusek dan Ray C Rist, terdapat setidaknya 7 tipe evaluasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Performance logic chain assessment*

Jenis evaluasi ini mencoba memberikan penilaian mengenai sebab sebab terbentuknya sebuah kebijakan, program atau proyek, baik dari segi kekuatan maupun logika. Biasanya tipe ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan kebijakan sebelumnya.

2. *Pre Implementation assessment*

Jenis evaluasi ini menggunakan pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan perencanaan implementasi program, evaluasi ini menilai apakah *outcome* dari program ini dapat diukur atau tidak, seberapa baik perencanaan dari implementasi program, dan apakah sumberdaya dalam menjalankan program sudah dikuasai dengan baik.

3. *Process implementation evaluation*

Jenis evaluasi ini sangat mirip dengan proses monitoring, tipe ini mengevaluasi keseluruhan proses implementasi dengan tambahan penilaian mengenai *outcome* yang tidak terduga. Evaluasi ini juga

memberikan gambaran mengapa sebuah program tidak berjalan dengan baik.

4. *Rapid appraisal*

Penggunaan evaluasi tipe ini diperuntukkan bagi program yang memerlukan pelaporan cepat dan *real-time* yang berfungsi untuk memberikan bahan pertimbangan cepat bagi pembuat keputusan, tipe ini menggunakan *multi-method* dari beberapa sumber data.

5. *Case study*

Metode ini merupakan metode yang digunakan bagi pengelola program untuk mengetahui secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada program tersebut berdasarkan pada kasus kasus riil yang terjadi dalam program tersebut.

6. *Impact Evaluation*

Metode evaluasi klasik yang digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah sebuah program, atau menilai bagaimana sebuah dokumen atau intervensi tertentu berpengaruh pada program, dan menemukan dampak terjadinya sesuatu terhadap program.

7. *Meta Evaluation*

Tipe ini berguna untuk merangkum keseluruhan evaluasi dari tipe tipe sebelumnya, kemudian hasil evaluasi ini dijadikan bahan untuk melihat potensi baik atau buruk dari sebuah program yang didapat dari berbagai macam sudut pandang studi.

Menurut teori Dunn, terdapat beberapa tujuan dari proses evaluasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan baik positif maupun negatif
5. Mengetahui jika ada penyimpangan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan datang.

Sedangkan manfaat evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas sebuah kegiatan
2. Mengetahui apakah sebuah kegiatan berhasil atau gagal
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik
4. Menunjukkan manfaat dari keberadaan sebuah program kepada *stakeholder*

b. Kriteria evaluasi

1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana keberhasilan sebuah program

2. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai sebanyak apa usaha yang dikeluarkan dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah program

3. Kecukupan

Kecukupan diartikan sebagai kemampuan sebuah program memberikan manfaat atau menjawab masalah. Dengan kata lain *adequacy* dapat diartikan sebagai ketepatan dalam menjawab masalah.

4. Kesamarataan

Merujuk pada sejauh mana keadilan diberikan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

5. Responsivitas

Dapat diartikan sebagai seberapa jauh tanggapan dari sasaran kebijakan publik, apakah kebijakan publik sudah memuaskan keinginan kelompok kelompok tertentu.

6. Ketepatan

Ketepatan berhubungan dengan hasil yang dicapai, poin ini berkenaan dengan apakah alternatif pilihan sebuah kebijakan telah mencapai tujuannya dengan baik.

Poin poin evaluasi ini menurut Dunn dalam Winarno (2012) yang dikutip (Gentur Wiku Pribadi, 2013) berhubungan dengan pertanyaan pertanyaan berikut:

Tabel 1.2 Poin-poin Evaluasi

No	Tipe Karakter	Pertanyaan
----	---------------	------------

1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan menyelesaikan masalah?
4	Kesamarataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai?

Sumber: Gentur Wiku Pribadi, 2013

2. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial

dan rasa aman, khusus bagi masyarakat rentan bencana berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan tangap bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. (PP No 21 Tahun 2008)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (PP No 21 Tahun 2008)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (PP No 21 Tahun 2008)

Penanggulangan bencana dilakukakan berdasarkan 4 aspek diantaranya (1) social, ekonomi, dan budaya masyarakat; (2) kelestarian lingkungan hidup; (3) kemanfaatan dan efektivitas; (4) lingkup luas wilayah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah akan menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk dihuni dalam artian dalam proses penanggulangan bencana pemerintah akan mencabut izin bangunan, hal ini bertujuan agar dapat mengurangi risiko dampak bencana. Ada 3 tahapan dalam penanggulangan bencana diantaranya adalah prabencana, tahapan ini digunakan oleh pemerintah untuk mengukur risiko bencana dan peluang kejadian bencana serta melakukan penanggulangan bencana agar bencana itu tidak terjadi. Tahapan yang kedua adalah saat tanggap darurat, kegiatan ini biasanya dilakukakan saat bencana terjadi seperti evakuasi korban bencana baik korban nyawa atau bangunan, biasanya pemerintah akan mengerahkan semua instansi terkait untuk melakukan evakuasi bencana. Yang ketiga adalah pascabencana, kegiatan ini dilakukan untuk pemulihan keadaan setelah bencana itu terjadi. Kegiatan ini biasanya berbentuk rekonstruksi bangunan dan rehabilitasi bagi korban yang mengalami dampak trauma akibat terkena bencana. (PP No 21 Tahun 2008)

1.7. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses memberikan penilaian terhadap sebuah kebijakan atau program yang telah berjalan selama periode tertentu, evaluasi program dilakukan oleh semua hierarki pemerintahan dari yang

terkecil hingga pemerintah pusat. Pada penelitian ini,peneliti menggunakan teori evaluasi milik Dunn yang mengelompokkan indikator evaluasi sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatangunaan.

2. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

1.8. Definisi Operasional

Tujuan dibuatnya definisi operasional adalah memberikan batasan-batasan bagi peneliti sehingga memudahkan untuk menganalisis data guna menjawab masalah peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 variable yaitu evaluasi program yang akan merujuk pada teori evaluasi menurut Dunn sedangkan untuk variable mitigasi bencana akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Indiktornya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

No.	Indikator	Hal yang dinilai
1.	Efektivitas	a. Adanya program mitigasi bencana tanah longsor b. Adanya rancangan waktu dalam menjalankan program mitigasi bencana tanah longsor c. Adanya penyesuaian jumlah program dengan keterlaksanaannya program yang telah disesuaikan dengan anggaran dan waktu

		pengerjaan
2.	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya anggaran khusus untuk menunjang program mitigasi bencana tanah longsor b. Sumberdaya manusia atau tenaga profesional yang khusus menangani program mitigasi bencana tanah longsor c. Pembangunan fasilitas khusus (seperti sirine tanda bahaya) untuk mendukung program mitigasi bencana tanah longsor
3.	Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya hasil dari program mitigasi bencana tanah longsor b. Adanya alternatif pilihan dalam menyelesaikan masalah kebencanaan
4.	Kesamarataan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat yang dirasakan oleh semua pihak dalam proses mitigasi bencana tanah longsor b. Adanya dampak dari program mitigasi bencana tanah longsor c. Cara penyampaian informasi mengenai program mitigasi bencana tanah longsor kepada seluruh elemen masyarakat
5.	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tangapan atau saran masyarakat terhadap program mitigasi bencana tanah longsor b. Upaya untuk menjaga dan mensukseskan program mitigasi bencana yang dilakukan c. Adanya kegiatan masyarakat dalam menjaga fasilitas pendukung mitigasi bencana tanah longsor seperti sirine tanda bahaya
6.	Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian masyarakat terhadap program mitigasi bencana tanah longsor b. Penilaiannya stikholder (BPBD Banjarnegra) terhadap program mitigasi bencana tanah longsor

1.9. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat

diartikan sebagai sebuah penelitian yang menggunakan banyak metode. Penelitian kualitatif secara sistematis melakukan pengumpulan data, pengorganisasian data dan menginterpretasikan informasi tekstual termasuk video dan gambar, serta menggunakan pendekatan induktif dalam mengungkap fenomena yang sulit untuk di kuantifikasi.

Indikator yang dijadikan oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian adalah definisi operasional yang merupakan bentuk implementasi serta turunan dari kerangka dasar teori.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam melakukan penelitian oleh peneliti adalah Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di daerah dataran tinggi Banjarnegara yang memiliki potensi terjadinya bencana tanah longsor antaranya Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dan kantor BPBD Banjarnegara di Jl. Gotong Royong No. 15, Kutabanjara, Banjarnegara Jawa Tengah.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan BPBD Banjarnegara yang mengelola langsung

program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1.4
Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Program mitigasi bencana yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara	Wawancara
Tanggapan masyarakat mengenai program	Kepala Sekretaris BPBD Banjarnegara	Wawancara
Fasilitas pendukung program mitigasi bencana tanah longsor	Kasi Logistik dan Kedaruratan	Wawancara
Manfaat program mitigasi bencana tanah longsor yang dirasakan oleh masyarakat	Warga Masyarakat	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen dokumen yang berhubungan dengan program mitigasi bencana

tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Internet
Rencana Strategis BPBD Banjarnegara Tahun 2012/2016	BPBD Banjarnegara
Rencana Strategis BPBD Banjarnegara Tahun 2017/2022	BPBD Banjarnegara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara Tahun 2018	BPBD Banjarnegara

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses mendapatkan data dengan cara bertemu dengan narasumber dan biasanya tehnik pengumpulan secara wawancara bisa medapatkan data secara lebih menditail. Manfaat dari wawancara itu sendiri adalah mengali persepsi dan pengalaman individu, membahas persoalan yang sensitif, bisa mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui survei.

Tabel 1.6 Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Materi Wawancara
1.	Andri Sulisty, SOR	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara	Program mitigasi yang dimiliki oleh BPBD Banjarnegara dan pelaksanaannya

2.	Umi Fatmah, S.Sos	Kepala Sekretaris BPBD Banjarnegara	Bagaimana pengukuran kepuasan masyarakat mengenai program mitigasi
3.	Agus Haryono, S.Sos	Kasi Logistik dan Kedaruratan	Fasilitas pendukung program mitigasi bencana tanah longsor
4.	Aufa Nazarudin	Warga Masyarakat	Manfaat program mitigasi bencana tanah longsor yang dirasakan oleh masyarakat
5.	Septian Wahyu Widodo	Warga Masyarakat	Manfaat program mitigasi bencana tanah longsor yang dirasakan oleh masyarakat

2. Teknik Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai upaya mengolah dan mengorganisir data, memecahnya dalam unit unit yang lebih kecil, kemudian mencari pola dan tema yang sama. Dalam penelitian kualitatif, data bersifat induktif yang artinya analisis data dimulai dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian peneliti akan membangun pola pola yang bersifat lebih umum sehingga peneliti dapat menemukan sebuah konsep, tema atau pola dari fenomena yang sudah ditemukan di awal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan unit analisa data yang didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber kemudian dikomparasikan dengan teori yang dimiliki Dunn mengenai evaluasi program.